

**TESIS**  
**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN  
NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ADMINISTRASI**



**Diajukan Oleh**

**MUHAMMAD BAHTIAR NUR**

**2320216310036**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN  
TEKNOLOGI  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
JUNI 2025**

**TESIS**  
**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN**  
**NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM**  
**ADMINISTRASI**



**Diajukan Oleh**

**MUHAMMAD BAHTIAR NUR**

**2320216310036**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,**  
**DAN TEKNOLOGI**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**BANJARMASIN**  
**JUNI 2025**

**KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Kenotariatan  
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh**

**MUHAMMAD BAHTIAR NUR, S.H.**

**2320216310036**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
JUNI 2025**

**Tesis ini  
telah diperiksa dan disetujui  
pada Tanggal .....**

**PEMBIMBING**



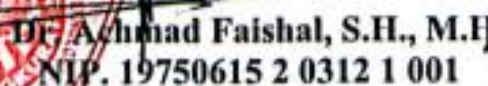
**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600418 198603 1 002**

**Diketahui oleh  
Koordinator Program Studi  
Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
NIP. 19730420 200312 2**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 2 0312 1 001**

Tesis ini telah dipertahankan di  
depan Sidang Panitia Penguji  
pada Tanggal.....

#### Susunan panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Saprudin, S.H., L.L.M.  
Sekretaris: Dr. Suprpto. S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Bahtiar Nur

NIM : 2320216310036

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 17 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Bahtiar Nur

NIM. 2320216310036

## RINGKASAN

### KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI

Oleh :

**Muhammad Bahtiar Nur<sup>1</sup>, Hadin Muhjad<sup>2</sup>**

**Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 156 halaman**

## RINGKASAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran vital dalam masyarakat, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui pembuatan akta autentik. Akta autentik ini merupakan alat bukti sempurna yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum. Meskipun Notaris memiliki peran penting, pelaksanaan tugasnya tidak selalu berjalan mulus dan seringkali dihadapkan pada risiko terkait penyalahgunaan kewenangan atau tindakan yang melanggar hukum. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris, sebagai salah satu badan yang memiliki kewenangan terkait pembinaan Notaris, menimbulkan pertanyaan penting mengenai sifat dan lingkup kewenangannya, khususnya ketika Notaris terlibat dalam dugaan tindak pidana. Persyaratan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris ini dirancang untuk melindungi Notaris dari intervensi yang tidak semestinya dalam menjalankan tugas jabatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa eksistensi Majelis Kehormatan Notaris pada profesi Notaris. Selain itu untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terkait Notaris yang terlibat dalam kasus pidana.

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *Preskriptif*, Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan yang bersifat administratif, yang diatur secara spesifik dalam Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014. Kewenangan ini termanifestasi dalam fungsi memberikan persetujuan atau menolak permintaan persetujuan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memanggil Notaris dalam rangka pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana. Kedudukan Majelis

---

<sup>1</sup> 2320216310036

<sup>2</sup> Pembimbing

Kehormatan Notaris sangat krusial dalam melindungi independensi Notaris dari intervensi yang tidak proporsional oleh penegak hukum. Proses persetujuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemanggilan Notaris tidak didasarkan pada alasan yang sewenang-wenang atau diluar konteks pelanggaran hukum yang jelas. Dalam praktiknya, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris ini berfungsi sebagai filter awal yang menyeleksi permintaan pemanggilan, sehingga menjaga marwah profesi Notaris. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris ini berpotensi menimbulkan gesekan atau kendala dalam proses penegakan hukum pidana. Keterlambatan dalam pemberian persetujuan atau penolakan yang tidak disertai alasan yang memadai dapat menghambat proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Hal ini menyoroti perlunya sinergitas dan koordinasi yang lebih baik antara Majelis Kehormatan Notaris dengan aparat penegak hukum agar tujuan perlindungan Notaris dapat berjalan selaras dengan prinsip supremasi hukum dan pencarian keadilan.

## ABSTRAK

### AUTHORITY OF NOTARY HONORARY COUNCIL FROM THE PERSPECTIVE OF ADMINISTRATIVE LAW

By

Muhammad Bahtiar Nur<sup>1</sup>, Hadin Muhjad<sup>2</sup>  
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 198 pages

#### ABSTRACT

*Keywords: Authority, Notary Honorary Council, Administrative Law*

The objectives of this research are to study and analyze the existence of Notary Honorary Council in Notary profession, and to study and analyze the authority of Notary Honorary Council related to a Notary who is involved in a criminal case. This is normative legal research or library research, the characteristic of the research is prescriptive, the approaches used are statute approach and conceptual approach. The results of the research are *firstly*, the existence Notary Honorary Council in the supervision of Notaries prior to the enforcement of Act Number 30 of 2004 was performed by the Court as stipulated in *Staatsblad* 1860 Concerning Regulation on Notary Position. After Act Number 30 of 2004, the supervision to the Notaries is carried out by Regional Supervisory Council and after that Act Number 2 of 2014 created Notary Honorary Council as substitute for Regional Supervisory Council with the same function namely to give approval or refusal upon the summon to a Notary by the legal enforcement apparatus. The authority of Notary Honorary Council in a criminal case which involves a Notary, there is a potential of dilemma between obligation to keep the office confidentiality and to provide testimony, and the problems arise especially at investigation stage related to approval to the summon to a Notary. Summon procedure to a Notary which requires approval of the Notary Honorary Council has potential contrary to the principle of simple, quick, and low cost trial and the principle of equality before the law.

Certified by,



<sup>1</sup> Student number: 2320216320036

<sup>2</sup> Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div  
Authorized Sworn Translator

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat-Nya ini lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi”**. Penulisan ini bertujuan sebagai syarat tugas akhir pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Mastur (alm) dan Ibunda Siti Mariyam yang telah memberikan semangat, kasih sayang, motivasi, doa, dukungan moril dan materil yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam penyelesaian penelitian tesis ini, semoga segala yang diberikan menjadi berkah bagi penulis, terimakasih dan penulis berterima kasih kepada Kakak-Kakak penulis Tinya Ma’rifah, Zunan Nasution, S. Sos., M.IP, Andik Mawardi, S.H., M.H, Diyah Fatmawati, Dwi Ardillah, S. Pd, Elly Murdiati, S. Pd yang telah memberikan dukungan, doa dan juga moril kepada penulis, sehingga penulis dapat menulis penelitian tesis ini sampai tesis ini selesai dikerjakan.

Selama melakukan penelitian ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan serta arahan, selain itu penulis banyak menerima dukungan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat;
3. Dr. Saprudin, S.H., L.LM selaku Pembimbing Akademik sekaligus Ketua tim penguji sidang tesis penulis, Terima kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu yang Bapak sediakan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. selaku pembimbing, terima kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu yang Bapak sediakan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
5. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku sekretaris tim penguji dari penelitian tesis ini. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang telah diberikan dalam penelitian ini. Semoga apa yang telah bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
6. Kepada belahan jiwaku Yullananda, terima kasih telah menjadi sandaran di saat lelah, penyemangat di kala ragu, dan pelabuhan tenang di tengah badai tesis ini. Segala cinta dan doamu adalah alasan mengapa aku bisa sampai di titik ini. Aku mencintaimu.

7. Seluruh anggota MTLF Associate yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, semangat, dan masukan dari awal sampai akhir sehingga penulis menyelesaikan kuliah di Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat dan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam bekerja dimanapun kalian berada;
8. Rekan-rekan Ahmad Zaki Ahsani, Denny Sugiarto, Lisna Mariatun, Susanto dan Zainal Arifin yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, semangat, dan masukan dari awal sampai akhir penulis menyelesaikan kuliah di Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, semoga apa yang kita cita-citakan di tahun ini akan tercapai;
9. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu selama peneliti melaksanakan perkuliahan;
10. Seluruh Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
11. Semua teman teman penulis di Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 dan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga segala yang telah diberikan mendapat berkah dari Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan,

sehingga penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian yang penulis buat ini bisa bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu Kenotariatan.

Banjarmasin, 17 Juni 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Muhammad Bahtiar Nur', written in a cursive style.

Muhammad Bahtiar Nur, S.H.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL DALAM .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS .....	v
RINGKASAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka .....	17
F. Metode Penelitian.....	59
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	69
<b>BAB II EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS PADA PROFESI NOTARIS.....</b>	<b>71</b>
A. Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Pada Profesi Notaris Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. ....	71
B. Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Pada Profesi Notaris Setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. ....	85
C. Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Pada Profesi Notaris Setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004	

Tentang Jabatan Notaris .....	108
BAB III KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT NOTARIS YANG TERLIBAT DALAM KASUS PIDANA .....	130
A. Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris dalam Sistem Peradilan Pidana .....	130
B. Mekanisme Persetujuan Pemanggilan Notaris dan Dampaknya Terhadap Proses Penyidikan.....	151
C. Tantangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana yang melibatkan Notaris.....	167
BAB IV PENUTUP .....	176
A. Kesimpulan.....	176
B. Saran .....	176
DAFTAR PUSTAKA	